



# WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 57 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2025 Nomor 8 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DUMAI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Wali Kota Dumai ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Dumai.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029.
9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

11. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan.
14. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuandan sasaran strategi organisasi.

#### Pasal 2

Tujuan penetapan perubahan Indikator Kinerja Utama ini adalah:

- a. untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 3

Indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini merupakan acuan ukuran kinerja yang di gunakan oleh masing-masing organisasi Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Daerah untuk menetapkan kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

#### Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang di hasil kan dalam pengukuran kinerja dan di gunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta- fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah serta disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

Dalam hal Indikator Kinerja Utama menimbulkan dampak negatif terhadap Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

#### Pasal 6

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan Kepada Wali Kota baik Laporan Tahunan ataupun Laporan setiap Triwulan.

#### Pasal 7

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, maka:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja program/kegiatan per-triwulan serta penetapan indikator kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah dan melaporkan kepada Walikota;
- b. Inspektorat melakukan review atas capaian kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Inspektorat melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah dan melaporkan kepada Wali Kota.

#### Pasal 8

Penjabaran Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 18 September 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
Pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 34 SERI D

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
 NOMOR 57 TAHUN 2025  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN  
 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	58,37	58,58	58,79	59	59,22	59,43	
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,7	78,35	79,02	79,67	80,33	82,95	
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04 - 6,12	5.06- 6.14	5.08- 6.16	5.10- 6.18	5.12- 6.20	5.14- 6.22	
4	Indeks Integritas	Indeks	75 - 75	75-77	75-79	75-81	75.01- 83	75.01- 83	
5	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	66,43	67,17	68,06	68,95	69,64	70,73	
6	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,76	3,79	3,81	3,84	3,87	3,89	
7	Tingkat Kemiskinan	%	2,48 - 2,70	2.41- 2.63	2.34- 2.56	2.27- 2.49	2.20- 2.42	2.13- 2.35	

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
 NOMOR 57 TAHUN 2025  
 TENTANG INDIKATOR KINERJA DAERAH  
 PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN  
 2025-2029

INDIKATOR KINERJA DAERAH  
 PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	66.43	67.17	68.06	68.95	69.64	70.73	
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.76	3.79	3.81	3.84	3.87	3.89	
3	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	54.91	58.15	61.65	64.88	67.56	71.86	
4	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	60.43	60.44	60.45	60.46	60.47	60.48	
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	41.06	41.08	41.1	41.12	41.14	41.14	
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	0.83-0.85	0.85-0.86	0.86-0.89	0.88-0.92	0.90-0.95	0.92-0.97	
7	Rasio Ekspor Non Migas terhadap total Ekspor Perdagangan Luar Negeri	%	94.20	94.25	94.30	94.34	94.39	94.44	
8	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	6.615	6.958	7.301	7.644	7.988	7.988	
9	Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (%)	%	4.85-4.85	4.85-4.8575	4.85-4.865	4.85-4.8725	5-5	5-5	
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	86.26	86.43	86.60	86.76	86.90	87	
11	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	%	2.9-3.0	2.8-3.00	2.7-3.00	2.6-3.00	2.5-3.00	2.5-3.00	
12	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian	%	94.20	94.27	94.33	94.40	94.47	94.54	
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	1.01	1.03	1.05	1.06	1.08	1.08	
14	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Kota Dumai	%	99	99	99	99	99	99	
15	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,04 - 6,12	5.06-6.14	5.08-6.16	5.10-6.18	5.12-6.20	5.14-6.22	
16	Tingkat Inflasi (%)	%	2.9-3	2.8-3	2.7-3	2.6-3	2.5-3	2.5-3	
17	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	%	4.70-4.77	4.64-4.71	4.57-4.64	4.51-4.58	4.45-4.51	4.38-4.45	
18	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap	%	0.55-0.55	0.55-0.615	0.55-0.68	0.55-0.745	0.55-0.81	0.55-0.81	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	PDRB (%)								
19	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	Koefisien	11.39	11.08	10.77	10.45	10.14	9.83	
II	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	58.37	58.58	58.79	59.00	59.22	59.43	
2	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	10.11	11.02	11.93	12.79	13.48	14.16	
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	11.42	10.92	10.42	9.92	9.42	9.42	
4	Indeks Risiko Bencana	Indeks	95.46	92.31	89.43	86.78	84.34	82.09	
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	76.17	76.66	77.13	77.59	78.04	78.04	
6	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	%	79.93	77.59	75.32	73.12	70.98	68.93	
7	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	0.84	0.85	0.87	0.88	0.89	0.90	
8	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	(%)	76.17	76.66	77.13	77.59	78.04	78.04	
9	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	19.3	21.38	23.43	25.44	27.42	29.36	
III	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Tingkat Kemiskinan	%	2.48-2.70	2.41-2.63	2.34-2.56	2.27-2.49	2.20-2.42	2.13-2.35	
2	Rasio Gini	Indeks	0.322-0.340	0.317-0.335	0.313-0.330	0.309-0.325	0.305-0.320	0.300-0.315	
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,7	78,35	79,02	79,67	80,33	82,95	
4	Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SD	Skor	65.77	68.27	70.77	73.27	75.77	78.27	
5	Skor Kemampuan Literasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SMP	Skor	75.75	76.85	77.95	79.05	80.15	81.25	
6	Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SD	Skor	56.14	59.04	61.94	64.84	67.74	70.64	
7	Skor Kemampuan Numerasi jenjang pendidikan di Kota Dumai: SMP	Skor	65.89	67.39	68.89	70.39	71.89	73.39	
8	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	(%)	18	19.20	20.40	21.60	22.80	24.00	
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10.27	10.33	10.38	10.44	10.50	10.55	
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.42	13.43	13.44	13.44	13.45	13.45	
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73.66	73.81	73.97	74.13	74.28	74.44	
12	Jumlah Kelahiran Hidup	Jiwa	9914	10305	10712	11135	11575	12032	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
13	Jumlah Kematian Ibu Absolut	Jiwa	9-9	8-8	7-7	6-6	5-5	5-5	
14	Jumlah Kematian Balita Absolut	Jiwa	138	136	134	132	129	129	
15	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
16	Total Fertility Rate (TFR)	%	2.29	2.27	2.26	2.24	2.19	2.18	
17	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	7.9	7.8	7.6	7.1	6.9	6.9	
18	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	71	71.2	72.5	73	73.2	73.5	
19	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	16.8	16.5	16	15.5	15	14	
20	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	80	83	85	87	90	92	
21	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	95.20	97.48	98	98.2	98.4	98.6	
22	Cakupan bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap	%	80	85	90	93	95	95	
23	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	67	67.5	68	68.5	69	70	
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.39-0.39	0.385-0.39	0.375-0.39	0.375-0.39	0.37-0.39	0.37-0.39	
25	PDRB per kapita (Rp Juta)	Rp. Juta Per Tahun	152.29-169.20	159.46-172.6	166.64-176	173.81-179.4	180.99-182.81	180.99-182.81	
26	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	27.27	33.33	39.00	45.00	51.00	57.00	
27	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57.94	58.44	58.94	59.44	59.44	60.44	
28	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0.58	0.6	0.62	0.64	0.66	0.68	
29	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	100	100	100	100	100	100	
30	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3.94-4.66	3.74-4.88	3.54-4.26	3.34-4.06	3.14-3.86	2.94-3.66	
31	Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	%	94.90-95.30	95.16-95.65	95.42-96.00	95.68-96.35	95.94-96.70	96.20-97.05	
32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai (%)	%	71.35-71.35	73.15-73.15	74.55-74.55	75.95-75.95	77.35-77.35	78.75-78.75	
33	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	1	2.75	4.50	6.25	8.00	8.00	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Integritas	Indeks	75-75	75-77	75-79	75-81	75.01-83	75.01-83	
2	Indeks SPBE	Indeks	3.92	-	-	-	-	-	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Indeks	-	2.16	2.35	2.55	2.74	2.94	
4	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	80	81.25	82.5	83.75	85	85	
5	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5.15	5.16	5.17	5.17	5.18	5.19	
6	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	65	67.8	70.6	73.4	76.2	79	
7	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	2.29	2.38	2.48	2.57	2.66	2.75	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90.28	90.78	91.28	91.78	92.28	92.78	
9	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	56.2	57.7	59.2	60.7	62.2	63.70	
1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Skor Kemampuan Literasi SD	Skor	65.77	68.27	70.77	73.27	75.77	78.27	
2	Skor Kemampuan Numerasi SD	Skor	56.14	59.04	61.94	64.84	67.74	70.64	
3	Skor Kemampuan Literasi SMP	Skor	75.75	76.85	77.95	79.05	80.15	81.25	
4	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Skor	65.89	67.39	68.89	70.39	71.89	73.39	
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	100	100	100	100	
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	%	97.2	97.94	98.69	99.25	99.25	99.25	
7	Indeks Pemerataan Guru SD	Indeks	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9	0.95	
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 Tahun Kesetaraan	%	42.24	47.22	52.19	57.17	62.15	67.12	
9	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	%	99.71	99.79	99.87	99.92	99.92	99.92	
10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun	%	59.06	62.64	65.42	68.61	71.79	74.83	
11	Terselenggaranya Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI)	Event	1	1	1	1	1	1	
12	Indeks Pemerataan Guru SMP	Indeks	1	1	1	1	1	1	
13	Iklim Keamanan SMP	Nilai	74.57	76.07	77.57	79.07	80.57	82.07	
14	Iklim Keamanan SD	Nilai	77.3	78.2	79.1	80	80.9	81.8	
15	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	74.54	75.54	76.54	77.54	78.54	79.54	
16	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	58.25	59	59.75	60.5	61.25	62	
17	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	75.33	76.33	77.33	78.33	79.33	80.33	
18	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	61.41	63.91	66.41	68.91	71.41	73.91	
19	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	63.01	65.41	67.81	70.21	72.61	75.01	
20	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi	%	64.79	81.81	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Minimal B								
AB	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan	%	25.93	40.74	55.56	70.37	85.19	100	
2	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Event	3	5	5	5	5	5	
3	Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	27.27	33.33	39.00	45.00	51.00	57.00	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN									
IV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	75	76	77	78	80	83	
2	Prevalensi obesitas > 18 tahun	%	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	
3	Prevalensi depresi pada usia > 15 tahun	%	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
4	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	50	50	50	58.33	66.67	75	
6	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	80.5	80.5	81.5	81.5	82.5	83.5	
7	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
8	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	
9	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	82	84	85	85	86	87	
10	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
11	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	58.33	58.33	58.33	66.67	66.67	66.67	
14	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	92.5	93	93	93.5	94	94	
15	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	75	76	77	78	80	83	
16	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	12.4	12	12	11	10	10	
17	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis	Per 1000	4.80	4.85	4.90	4.95	5	5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	terhadap populasi	Penduduk							
18	Persentase puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	60	70	80	90	100	100	
19	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
20	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase	55	60	65	70	80	90	
21	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	
1.02.0.00.0.00.01.0013 - RSUD									
VI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	85	85	87	87	89	91	
1.02.0.00.0.00.01.0014 - Puskesmas Dumai Kota									
VIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	59.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
1.02.0.00.0.00.01.0015 - Puskesmas Dumai Barat									
X	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
1.02.0.00.0.00.01.0016 - Puskesmas Bukit Kapur									



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025 (04)	2026 (05)	2027 (06)	2028 (07)	2029 (08)	2030 (09)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
4	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
1.02.0.00.0.00.01.0020 - Puskesmas Purnama									
XX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
3	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
4	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
1.02.0.00.0.00.01.0021 - Puskesmas Jaya Mukti									
XXII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
1.02.0.00.0.00.01.0022 - Puskesmas Bukit Kayu Kapur									
XXIV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
3	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
1.02.0.00.0.00.01.0024 - Puskesmas Sungai Sembilan									
XXVI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	69.5	71.5	72.5	73.5	75.5	75.5	
2	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan penemuan kasus TB	%	80	83	85	87	90	92	
4	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan	%	76	76	76	76	76	76	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM									
XXVIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase	20	23	26	29	62	65	
2	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persentase	45	48	51	54	57	60	
3	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	9.52	12.70	14.29	17.46	19.05	26.98	
4	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	54.91	58.15	61.65	64.88	67.56	71.86	
5	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	50	53	56	59	62	65	
1.03.0.00.0.00.01.0001 - UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A									
XXX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	54.91	58.15	61.65	64.88	67.56	71.86	
1.03.0.00.0.00.01.0002 - UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A									
XXXII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	54.91	58.15	61.65	64.88	67.56	71.86	
1.03.0.00.0.00.01.0003 - UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A									
XXXIV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	54.91	58.15	61.65	64.88	67.56	71.86	
1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG									
XXXVI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak	%	19.30	21.38	23.43	25.44	27.42	29.36	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025 (04)	2026 (05)	2027 (06)	2028 (07)	2029 (08)	2030 (09)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	91.36	87.85	87.28	86.79	86.36	85.98	
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	76.17	76.66	77.13	77.59	78.04	78.04	
4	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak	%	79.93	77.59	75.32	73.12	70.98	68.93	
5	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kota Dumai	%	32	34	36	38	40	42	
6	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Layak	%	19.30	21.38	23.43	25.44	27.42	29.36	
7	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Aman	%	0	0	0.972	1.922	2.855	2.827	
8	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	0.40	0	0.83	1.05	1.26	1.48	
9	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	2.09	3.46	4.82	6.13	7.43	8.70	
AB	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi	Persentase	100	20	40	60	80	100	
2	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persentase	100	20	40	60	80	100	
1.04.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
XXXVIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase warga negara korban bencana atau terkena relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	70.42	74.54	78.34	80.65	82.85	86.36	
3	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase	45.65	50.00	54.35	56.52	58.70	60.87	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.06.0.00.2.13.05.0000 - DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT									
XLVI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang ditingkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	
AB	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahnya	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	
2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA									
XLVIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	20	20	20	20	20	20	
2	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	10	10	10	10	10	10	
3	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	10	10	10	10	10	10	
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	90	90	90	90	90	90	
2.08.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
L	INDIKATOR KINERJA KUNCI								



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	(Nomor Kontrol Veteriner)								
5	Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	%	40	50	57.14	62.50	66.67	70	
6	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan		45	0	0	0	0	0	
7	Peningkatan Produksi Perkebunan	Ton	152496	154021	155561	157116	158688	160275	
8	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	12.21	14.08	14.56	15.02	16.43	16.43	
9	Persentase Kasus Penyakit Hewan Menular	%	22.22	18.52	14.82	11.11	7.41	3.7	
10	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton	3231	3392	3562	3740	3927	4124	
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP									
LIV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	0	50	50	50	55	60	
2	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	0	60	70	75	80	90	
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	44.5	49.1	51.6	53	57.7	62.9	
4	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	80	85	87	90	93	95	
5	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	0	50	50	50	55	60	
6	Persentase RTH	Persentase	65	66	67	68	69	70	
7	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	72	74	76	79	81	84	
9	Indeks Kualitas Air	Indeks	35.35	35.55	35.75	35.95	36.15	36.35	
10	Indeks Kualitas Udara	Indeks	70.84	71.14	71.44	71.74	72.04	72.34	
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
LVI	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	90	91	92	93	94	95	
LVII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025 (04)	2026 (05)	2027 (06)	2028 (07)	2029 (08)	2030 (09)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	34	40	50	60	70	75	
2	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	60	70	75	80	85	90	
6	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2.14.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
LIX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	45	46	47	48	49	50	
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	71	71.2	72.5	73	73.2	73.5	
3	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.29	2.27	2.26	2.24	2.19	2.18	
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	7.9-7.9	7.8-7.8	7.6-7.6	7.1-7.1	6.9-6.9	6.9-6.9	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN									
LXI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani	Persentase	0	20	40	60	80	100	
2	Konektivitas Laut dan Sungai	%	0	20	40	60	80	100	
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	77	79	83	86	88	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025 (04)	2026 (05)	2027 (06)	2028 (07)	2029 (08)	2030 (09)	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN									
LXIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	96	97	98	99	100	100	
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey)	%	100	100	100	100	100	100	
AB	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2.77	3	3.2	3.3	3.5	3.5	
AC	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Persentase Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	
2.17.3.31.0.00.02.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN									
LXV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	68	69	70	71	72	72	
2	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	40	45	50	55	60	65	
3	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	25	30	35	40	45	50	
4	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	7	10	13	16	19	21	
5	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	40	41	42	43	44	44	
6	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	20	21	22	23	24	24	
AB	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil Menengah	%	10	12	14	16	18	20	
2	Persentase Izin Usaha Industri Kecil Menengah yang Diterbitkan	%	7	8	10	11	12	14	
3	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persentase	8	10	11	12	13	14	
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
LXVII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
AA	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	triliun rupiah	13.6	15	16.5	18	20	22	
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	85	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase peningkatan jumlah proyek investasi	%	10	10	10	10	10	10	
2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA									
LXIX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	0	75	80	85	90	95	
2	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	80	90	90	90	95	95	
3	Persentase Atlet yang berprestasi	%	80	90	90	90	95	95	
AB	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	80	80	80	85	90	90	
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	80	80	80	85	90	90	
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	80	80	80	85	90	90	
2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
LXXI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	70.5	71	71.5	72	72.5	73	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	64.5	65	65.5	66	66.5	67	
AB	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	55	57	60	65	70	75	
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	0	10	15	20	25	30	




NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Pembangunan								
6	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	100	100	100	100	100	100	
7	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
8	Efektivitas Kebijakan Sumber Daya Alam	%	100	100	100	100	100	100	
9	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
10	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	86.50	86.80	86.85	86.90	88.50	90	
4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD									
LXXIX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	4.02 - SEKRETARIAT DPRD								
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	0	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
LXXXI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	5.01 - PERENCANAAN								
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPDP	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH									
LXXXIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	5.02 - KEUANGAN								
1	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	65.05	66.55	67.80	68.82	69.62	70.12	
2	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	40.25	38.80	30	30	30	30	
3	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur	Persentase	21.56	22.72	40	40	40	40	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Pelayanan Publik								
4	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	13.86	12.96	11.95	10.86	9.60	8.20	
5	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	16.58	19.58	10.60	14.16	17.91	21.91	
6	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5.02.0.00.0.00.03.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH									
LXXXV	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	5.02 - KEUANGAN								
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	33	34	35	36	37	38	
5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									
LXXXVII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	5.03 - KEPEGAWAIAN								
1	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	96.7	96.75	96.8	96.85	96.9	97	
2	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	1.6	2	2.3	2.4	2.5	2.6	
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	8	8	12	15	15	15	
4	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	61.4	60.4	61.6	61	60.9	60	
AB	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	
5.05.0.00.0.00.01.0000 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH									
LXXXIX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Persentase	0	0	42	44	46	48	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	12	36	50	64	74	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	Dumai Timur								
4	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN BUKIT KAPUR									
XCVII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	7.01 - KECAMATAN								
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Bukit Kapur	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Bukit Kapur	%	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN DUMAI KOTA									
XCIX	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	7.01 - KECAMATAN								
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan Dumai Kota	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan Dumai Kota	%	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN DUMAI SELATAN									
CI	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	7.01 - KECAMATAN								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	ketertiban umum kewilayahan kecamatan Sungai Sembilan								
4	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
CVII	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	90	90	90	90	90	90	
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	90	90	90	90	90	90	
4	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	90	90	90	90	90	90	

  
 WALI KOTA DUMAI,  
 PAISAL